

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Mengenai Guru

1. Pengertian Guru

Guru merupakan elemen fundamental dalam sistem Pendidikan karena memiliki tanggung jawab moral terhadap perkembangan peserta didik. Menurut Lisnasari *et al.*, (2023, hlm. 1-2), guru berasal dari kata “digugu” dan “ditiru” yang artinya seseorang yang dapat dipercaya dalam perkataan maupun perbuatan, serta pantas dijadikan contoh bagi peserta didik dan masyarakat. Menurut Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2005, mengenai guru dan dosen, mendefinisikan guru sebagai pendidik yang memiliki profesi serta tugas utama yang meliputi pengajaran, bimbingan, melatih, menilai, mengarahkan, serta mengevaluasi peserta didik dalam jalur pendidikan formal dari tingkat anak usia dini hingga pendidikan menengah. Guru sebagai pendidik profesional memiliki kewajiban dalam membentuk kepribadian serta karakter peserta didik. Sebagai tenaga pendidik profesional, guru memainkan tugas yang lebih luas daripada sekedar mengajar, mereka juga membantu mengembangkan karakter, serta berperan sebagai teladan bagi peserta didik. Selain itu, guru juga berperan penting membantu peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai sosial mencakup toleransi, disiplin, serta rasa tanggung jawab melalui kegiatan pembelajaran serta pembiasaan di lingkungan sekolah.

Menurut Kamal (2019, hlm. 1-2), menegaskan bahwa guru merupakan komponen utama dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Guru tidak sebatas bertugas dalam penyampaian ilmu semata, melainkan juga berperan sebagai pembina, motivator, serta pembimbing yang membantu peserta didik dalam mencapai potensi dirinya secara ideal. Oleh sebab itu, guru memainkan peran yang multidimensi, yang mencakup pengembangan dimensi

intelektual, moral, emosional, serta sosial dalam keseluruhan proses pendidikan.

2. Peran dan Fungsi Guru

Guru memiliki peran dan fungsi strategis dalam dunia Pendidikan. Guru bukan hanya bertugas sebatas menyampaikan materi, melainkan juga berperan dalam mengembangkan karakter moral serta etika peserta didik, serta membimbing mereka untuk memiliki pemikiran dan perilaku yang baik. Guru juga memikul tanggung jawab yang sangat berat, karena dipercaya oleh banyak orang untuk mendidik, membimbing, serta mengarahkan mereka agar menjadi pribadi yang memiliki karakter berakhlak mulia. Dengan tanggung jawab tersebut, guru memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus generasi penerus yang cerdas, dan berwawasan kebangsaan. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam dunia pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan pengabdian seorang guru. Menurut Kamal (2019, hlm. 2-5), menyebutkan setidaknya ada tiga fungsi utama guru, yaitu :

- a. Fungsi instruksional, menempatkan guru sebagai perancang dari pelaksana pembelajaran. Guru bertanggung jawab menyampaikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai – nilai melalui strategi yang efektif dan inovatif. Dalam fungsi ini guru dituntut menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan bermakna sehingga peserta didik mampu mencapai kompetensi yang diharapkan.
- b. Fungsi edukasional, menegaskan bahwa peran guru ialah membentuk kepribadian dan karakter peserta didik. Guru menanamkan nilai moral, sosial dan spiritual seperti disiplin, toleran, kejujuran dan tanggung jawab. Melalui bimbingan dan keteladanan, guru dapat berkontribusi dalam membangun karakter berakhlak mulia.
- c. Fungsi managerial, guru menunjukkan kemampuan dalam mengelola proses pembelajaran. Guru mengatur kelas, mengorganisasi sumber belajar, serta membangun lingkungan

belajar yang nyaman dan kondusif. Melalui pengelolaan kelas yang terencana, suasana kelas menjadi tertib, efektif, serta mendorong partisipasi aktif peserta didik.

Selain ini, guru juga bertindak sebagai agen perubahan sosial (*agent of change*). Menurut Lisnasari *et al.*, (2023), menjelaskan bahwa guru juga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai sosial termasuk empati, kerja sama, toleransi, dan rasa tanggung jawab melalui pembelajaran serta keteladanan.

Dengan demikian, tugas guru bukanlah suatu hal yang mudah. Guru dituntut memiliki kesabaran, keikhlasan dan juga profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pembimbing dan teladan bagi peserta didik.

3. Kompetensi guru

Kompetensi guru adalah kemampuan yang dibutuhkan pendidik untuk menjalankan tanggung jawab secara profesional. Menurut Lisnasari *et al.*, (2023, hlm. 17-23), terdapat empat kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh guru profesional, yaitu :

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam mengawasi proses pembelajaran secara efisien, yang meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, mengorganisasikan dan pelaksanaan pembelajaran, serta menganalisis dan mengevaluasi terhadap hasil belajar. Kemampuan pedagogik yang kuat memungkinkan guru memilih dan memodifikasi strategi, metode serta media pembelajaran supaya sesuai dengan kebutuhan serta potensi peserta didik secara individual.

b. Kompetensi Profesional

Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam menguasai materi pembelajaran yang mendalam, baik secara konseptual maupun aplikatif. Seorang guru profesional bukan hanya menguasai isi materi pengajaran yang diajarkan, namun juga

menguasai cara penyajian yang efektif agar mudah dipahami peserta didik.

c. **Kompetensi Sosial**

Kompetensi ini berhubungan dengan seberapa baik seorang guru dapat menjalankan hubungan serta komunikasi yang baik dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Kemampuan ini mampu membangun hubungan interpersonal yang harmonis, menunjukkan sikap empati, dan saling menghargai latar belakang sosial peserta didik.

d. **Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi ini untuk menunjukkan kemampuan seorang guru untuk menunjukkan karakter yang berakhlak mulia, bijaksana, dan berwibawa. Guru dengan kepribadian yang baik akan menjadi yang contoh bagi peserta didik, dalam bersikap, bertutur kata, maupun bertindak.

Menurut Ifnaldi & Andani (2021, hlm. 73), menekankan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran membutuhkan keseimbangan antara kualitas pendidikan, profesional, sosial dan kepribadian, bukan hanya sekedar pemahaman terhadap materi atau metode mengajar semata

Dengan demikian, kompetensi guru menjadi faktor utama dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi tersebut, pengembangan komponen guru perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan, refleksi diri, dan pengembangan profesional berkelanjutan agar guru senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

4. Guru Pendidikan Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila merupakan seseorang yang bekerja memberikan pemahaman dan pengetahuan yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Guru Pendidikan Pancasila mempunyai tugas utama dalam mengembangkan sikap, prinsip-prinsip moral, serta wawasan kebangsaan peserta didik. Guru Pendidikan Pancasila merupakan guru profesional yang memiliki

kompetensi dan bertanggung jawab untuk menanamkan prinsip-prinsip Pancasila, semangat nasionalisme, dan membimbing peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik. Komara (2017) menyatakan bahwa Guru Pendidikan Pancasila harus mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan agar peserta didik dapat memahami prinsip-prinsip kewarganegaraan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

5. Peran Guru Pendidikan Pancasila

Guru Pendidikan Pancasila memiliki peranan penting dalam memperkuat dan memperkaya pemahaman nilai-nilai demokrasi Pancasila di kalangan peserta didik. Menurut Rahima (2024), menegaskan bahwa Guru Pendidikan Pancasila berada di garis depan dalam menumbuhkan cita-cita demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, mencakup musyawarah, keadilan sosial, dan menjunjung hak asasi manusia. Peran tersebut menunjukkan bahwa guru Pendidikan Pancasila ikut berkontribusi dalam pembentukan karakter kebangsaan yang luas. Ada empat dimensi peran Guru Pendidikan Pancasila, antara lain :

- a. Dimensi edukatif, peran guru mengintegritaskan aspek moral, sosial, dan intelektual dalam pembelajaran PKn (Komara, 2017).
- b. Dimensi keteladanan, peran guru sebagai panutan moral dan model perilaku etis bagi peserta didik (Hidayat *et al.*, 2024).
- c. Dimensi sosial – emosional, peran guru dalam menumbuhkan empati, komunikasi demokratis, dan kepekaan sosial di kelas (Silaban *et al.*, 2024)
- d. Dimensi reflektif dan pengawasan nilai, guru berperan dalam membantu peserta didik melakukan introspeksi moral dan menilai sikap mereka (Prayogi *et al.*, 2024)

Maka demikian, guru Pendidikan Pancasila tidak sekedar mengajarkan pengetahuan mengenai negara dan konstitusi, melainkan berperan penting dalam membentuk kepribadian bangsa yang

dilandaskan dengan prinsip-prinsip Pancasila, demokrasi dan cinta tanah air.

B. Kajian Mengenai Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan secara disengaja, terencana, dan berkelanjutan oleh pendidik untuk membimbing dan mendukung peserta didik menanamkan nilai-nilai kebaikan dan luhur. Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai proses penanaman nilai moral yang berperan sebagai pendukung dalam perkembangan peserta didik agar menjadi manusia yang memberikan dampak positif bagi masyarakat (Ali, 2018 dalam Salim *et al.*, 2022).

Pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Lickona (2012, hlm. 85-99) merupakan akar dari filsafat moral Aristoteles, yang memandang bahwa keutamaan moral bukan hanya persoalan pengetahuan, tetapi juga hasil dari pembiasaan melalui tindakan nyata. Aristoteles berpendapat bahwa seseorang menjadi manusia berbudi luhur bukan semata-mata karena memahami prinsip-prinsip kebaikan, tetapi karena terbiasa melakukan tindakan yang mencerminkan keutamaan moral di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pemikiran tersebut, Lickona mengembangkan dasar konseptual mengenai pembentukan karakter baik terdiri atas tiga komponen utama, yang dikenal dengan konsep *Triadic Components of Good Character*, yaitu:

a. Moral *Knowing*

Komponen ini merupakan kemampuan kognitif seseorang dalam memahami dan menilai Tindakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Pada tahap ini, seseorang bukan hanya mampu membedakan antara tindakan yang baik atau tidak, melainkan juga memahami dasar pemikiran yang melandasi setiap nilai

kebaikan tersebut. Lickona (2012) menjelaskan terdapat enam unsur dalam komponen ini, antara lain:

- 1) *Moral awareness* (kesadaran moral), kemampuan mengenali bahwa suatu situasi mengandung persoalan benar dan salah serta memerlukan pertimbangan etis.
- 2) *Knowing moral values* (pemahaman terhadap nilai-nilai moral), pengetahuan mengenai nilai-nilai dasar seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.
- 3) *Perspective taking* (kemampuan mengambil sudut pandang orang lain), kesanggupan memahami cara berpikir, perasaan, dan kondisi orang lain secara empatik.
- 4) *Moral reasoning* (penalaran moral), kemampuan seseorang dalam menilai dan memberikan alasan mengapa suatu Tindakan dianggap benar atau salah.
- 5) *Decision making* (pengambilan keputusan moral), kemampuan seseorang dalam menentukan tindakan yang paling sesuai dengan prinsip moral dalam situasi tertentu.
- 6) *Self knowledge* (pengetahuan diri). Kemampuan kesadaran seseorang terhadap kekuatan, kelemahan, serta kecenderungan diri sendiri dalam bertindak secara moral.

Keenam unsur ini berperan penting dalam membentuk cara berpikir seseorang agar mampu membuat Keputusan yang etis dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan demikian, *moral knowing* berfungsi sebagai dasar landasan penalaran dalam pendidikan karakter yang membantu peserta didik memahami secara rasional mengapa suatu Tindakan dikatakan baik atau buruk, benar atau salah, sehingga peserta didik mampu melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diyakini.

b. *Moral Felling*

Komponen ini berhubungan dengan aspek afektif dalam diri seseorang yang menjadi pendorong munculnya perilaku baik.

Menurut Lickona (2012), pengetahuan moral tanpa perasaan moral hanya akan menghasilkan individu yang tahu nilai – nilai kebaikan tanpa ada keinginan untuk melaksanakannya. Moral *feeling* berfungsi menumbuhkan kepekaan atau motivasi untuk menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Adapun enam unsur dalam komponen ini, yaitu :

- 1) *Conscience* (Hati Nurani), kemampuan moral yang membantu seseorang membedakan antara perilaku benar dan yang salah, dan menjadi pemandu moral dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab.
- 2) *Self – Esteem* (Harga Diri), mencerminkan rasa bangga terhadap diri sendiri karena berperilaku sesuai nilai-nilai moral yang diyakini, sehingga mendorong seseorang untuk mempertahankan perilaku baik.
- 3) *Empathy* (Empati), kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain, yang melahirkan sikap peduli, toleransi, dan keinginan untuk membantu sesama.
- 4) *Loving the Good* (Cinta terhadap Kebaikan). Perasaan senang dan puas seseorang ketika melakukan Tindakan baik, sehingga individu terdorong untuk terus menerus berbuat kebaikan terhadap sesama secara sukarela.
- 5) *Self-Control* (Pengendalian Diri), kemampuan menahan Tindakan negatif dan mengendalikan emosi agar tetap bertindak sesuai dengan norma.
- 6) *Humility* (Kerendahan Hati), menggambarkan sikap sadar akan keterbatasan diri, terbuka terhadap kritik, serta mau belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri.

Oleh karena itu, dengan mengembangkan moral *feeling*, peserta didik bukan hanya memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai kebajikan, tetapi juga memiliki kepekaan dan komitmen untuk menjadikannya bagian dari kehidupan sehari – hari.

c. *Moral Action*

Komponen ini merupakan bentuk konkret dari pengetahuan dan perasaan moral yang diwujudkan melalui perilaku yang mencerminkan nilai kebaikan. Lickona (2012) menegaskan bahwa Tindakan moral lahir dari integrasi antara kemampuan memahami nilai dengan kemampuan batin untuk melakukannya. Terdapat tiga unsur utama dalam komponen ini, antara lain :

- 1) *Moral Competence* (Kemampuan Moral), yaitu kemampuan individu untuk menerapkan nilai-nilai moral di kehidupan sehari-hari melalui pengambilan keputusan yang adil, bijaksana, dan tanggung jawab.
- 2) *Moral Will* (Kemauan Moral), merupakan tekad kuat yang mendorong seseorang untuk berbuat benar meskipun dalam keadaan tertekan, tantangan, atau godaan untuk melakukan hal sebaliknya.
- 3) *Moral Habit* (Kebiasaan Moral), merupakan hasil dari penerapan perilaku baik secara konsisten, sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam karakter serta kepribadian individu.

Dengan demikian, *moral action* menjadi tahapan tertinggi dalam membentuk karakter, karena individu tidak sekedar memahami dan menghargai nilai-nilai kebaikan saja, namun juga membiasakan peserta didik untuk mengimplementasikan nilai kebaikan tersebut dalam aktivitas sehari – hari.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

a. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter memiliki tujuan dalam meningkatkan kualitas serta hasil pendidikan dengan berorientasi pada pengembangan karakter serta menumbuhkan karakter terpuji peserta didik secara menyeluruh, terintegrasi, dan seimbang sesuai dengan capaian kompetensi pada setiap jenjang pendidikan (Maemunah, 2015, dalam Salim *et al.*, 2022). Selain memperoleh

dan menerapkan pengetahuan secara mandiri, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menyerap nilai-nilai moral serta sifat-sifat karakter melalui pendidikan karakter tersebut, serta dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan juga dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam buku pengembangan budaya dan karakter bangsa (dalam Wahyuni, 2021, hlm. 14-17), ialah:

- 1) Mengembangkan potensi batin, nurani, serta kepribadian peserta didik agar dapat mewakili cita-cita dan budaya bangsa sebagai individu maupun warga negara.
- 2) Menanamkan kebiasaan dan perilaku positif pada peserta didik yang selaras dengan nilai-nilai luhur serta tradisi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
- 3) menumbuhkan rasa tanggung jawab serta sikap kepemimpinan pada peserta didik sebagai generasi masa depan bangsa.
- 4) Meningkatkan keterampilan peserta didik agar berkembang menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas.
- 5) Menciptakan lingkungan sekolah menjadi tempat belajar yang kreatif, aman, dan jujur di mana peserta didik menjunjung tinggi persahabatan, dan menumbuhkan rasa patriotisme yang kuat.

b. Fungsi Pendidikan Karakter

Menurut Wahyuni (2021) ada tiga fungsi pendidikan karakter, sebagai berikut :

- 1) Pengembangan: hal ini bertujuan meningkatkan potensi peserta didik yang menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan karakter bangsa dan nilai budaya, guna membantu peserta didik berkembang menjadi individu yang berakhlak mulia.

- 2) Perbaikan: upaya ini bertujuan untuk memperkuat peran pendidikan nasional dalam membina dan mengembangkan potensi peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bermartabat.
- 3) Penyaring: upaya ini berfungsi untuk memilah pengaruh budaya, baik dalam negeri maupun luar negeri, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip budaya serta karakter luhur bangsa.

3. Nilai – Nilai Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Merdeka

Profil Pelajar Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter guna mencapai pertumbuhan yang seimbang dalam hal pengetahuan, keterampilan dan sikap, merupakan komponen utama dari kurikulum merdeka yang dikembangkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Fitria *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa terdapat enam dimensi utama dalam Profil Pelajar Pancasila yang perlu diketahui, antar lain:

- a. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu di mana nilai ini menekankan pembentukan sikap religius, kejujuran, tanggung jawab, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dimensi ini ditanamkan dalam pembiasaan keagamaan dan perilaku positif di lingkungan sekolah.
- b. BerkeBhinnekaan global, yaitu nilai yang menanamkan sikap saling menghargai perbedaan antar suku, budaya, ras, agama, maupun pandangan, serta menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan masyarakat. Peserta didik diharapkan dapat memiliki wawasan global yang tetap menjunjung tinggi identitas budaya bangsa.
- c. Gotong royong, yaitu nilai yang mengutamakan pentingnya kerja sama, kepedulian dan solidaritas dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kegiatan secara Bersama – sama.

- d. Mandiri, nilai ini menitikberatkan kemampuan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam proses belajar dan perkembangan dirinya secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Dimensi ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- e. Bernalar kritis, nilai ini mencerminkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh, mengolah, serta menganalisis informasi secara objektif, memecahkan berbagai masalah, serta mengambil keputusan melalui proses berpikir yang logis, rasional serta didukung dengan bukti.
- f. Kreatif, nilai ini menitikberatkan pada kemampuan peserta didik untuk menghasilkan ide, konsep, atau karya baru yang inovatif. Dalam kurikulum Merdeka peserta didik didorong untuk aktif terlibat langsung dalam proses pembelajaran berbasis proyek yang pada akhirnya dapat mengembangkan kreativitas serta kemampuannya dalam berinovasi.

Maka dengan itu, nilai-nilai pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka tidak dilakukan dengan hanya menyampaikan secara teori, namun juga diimplementasikan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, pembentukan kebiasaan, serta proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila sehingga mampu membentuk peserta didik yang berkarakter serta siap menghadapi tantangan global.

C. Kajian Mengenai Karakter Toleransi

1. Pengertian Karakter Toleransi

Toleransi merupakan nilai pokok yang memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial, khususnya di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang. Secara etimologis, toleransi berasal dari kata “*tolerance*” dalam bahasa Inggris yang artinya membiarkan, menghargai, serta menerima adanya perbedaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan toleransi

sebagai sikap untuk menerima pendapat, keyakinan, serta tradisi orang lain yang berbeda dengan pandangan pribadi.

Menurut Nurhayati (2024), mengemukakan bahwa toleransi merupakan sikap konstruktif yang tercermin dalam perilaku saling menghargai keberagaman pendapat, agama, suku, ras dan budaya, baik antar individu maupun antarkelompok. Sikap toleransi memegang peranan penting dalam menciptakan keharmonisan sosial. Selain itu, toleransi juga dapat dipahami sebagai kesadaran pribadi akan adanya keberagaman tanpa harus meninggalkan atau melemahkan keyakinan sendiri. Sedangkan menurut Salim *et al.*, (2022), toleransi merupakan sikap atau tindakan yang menunjukkan keterbukaan, menghargai, memahami, serta menerima adanya perbedaan keyakinan, pendapat, latar belakang budaya, suku, maupun pandangan hidup orang lain. Toleransi juga mencerminkan sikap menghormati keberagaman ras, suku, agama, sikap, dan juga tindakan individu yang memiliki perbedaan diri sendiri.

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa toleransi ialah sikap dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan keterbukaan, saling menghormati dan menghargai, serta penerimaan terhadap perbedaan. Toleransi menjadi faktor utama dalam menjaga keharmonisan sosial serta membangun hubungan yang damai di masyarakat yang beragam.

2. Tujuan Penguatan Karakter Toleransi

Penguatan karakter toleransi memiliki tujuan untuk mengajarkan peserta didik cara menghargai keberagaman serta dapat hidup berdampingan secara harmonis di lingkungan multikultural. Toleransi di dunia pendidikan tidak hanya mengajarkan mengenai sikap menghargai keberagaman, namun juga mengajarkan peserta didik dalam menjalin hubungan sosial yang positif serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dwintari (2023) menjelaskan bahwa toleransi nilai yang mendukung terciptanya keharmonisan dan

menuntun individu untuk menerima perbedaan latar belakang, ras, suku, agama, dan pandangan sehingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan damai.

Penguatan karakter toleransi juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga. Melalui penguatan karakter toleransi ini, peserta didik diharapkan mampu menghormati hak orang lain, lebih terbuka terhadap perbedaan, dan mampu menyelesaikan perselisihan secara damai. Penguatan karakter toleransi yang diterapkan oleh guru dapat memberikan pengaruh positif terhadap perubahan perilaku peserta didik, sehingga mereka mampu hidup bersosialisasi tanpa adanya pandangan perbedaan, serta memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi (Rahmatika & Brata, 2023). Dengan demikian, tujuan dari penguatan karakter bukan hanya berfokus dalam pembentukan perilaku pada individu peserta didik, melainkan untuk mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang rukun dan harmonis.

D. Kajian Mengenai Pendidikan Pancasila

1. Pengertian Pendidikan Pancasila

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kini telah berevolusi menjadi Pendidikan Pancasila seiring dengan adanya perkembangan kurikulum nasional saat ini. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang secara strategis membantu dalam peserta didik mengembangkan karakter dan jati diri mereka warga negara Indonesia yang baik (*good citizen*). Secara etimologis, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah "*civic education*"

dalam bahasa inggris. Sementara itu, Cholisin (2000) (dalam Winarno, 2025, hlm. 5) mengartikan bahwa :

“Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara. Semua itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa serta negara.”

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga dipahami sebagai tempat untuk menanamkan pendidikan moral dan nilai yang didasarkan pada Pancasila untuk mengembangkan karakter peserta didik. PPKn ini juga tidak hanya menitikberatkan pada aspek pengetahuan, melainkan juga dalam aspek sikap dan keterampilan sehingga peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Sejalan dengan ini, menurut Latifah *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan sarana pembinaan karakter, sikap, dan moral peserta didik agar membantu mereka membentuk kepribadian yang selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila di lingkungan sekolah, rumah, dan di masyarakat.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003, Pendidikan Pancasila merupakan mata pelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan rasa identitas nasional dan cinta tanah air. Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan yang didefinisikan oleh Numan Somantri (2001) (dalam Winarno, 2025, hlm. 5) sebagai program pendidikan yang berdasarkan politik demokrasi yang berkembang seiring dengan sumber-sumber informasi lainnya, serta menunjukkan manfaat pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Semua proses ini digunakan untuk mengajarkan peserta didik dalam berpikir kritis, analitis, serta bertindak demokratis dalam mempersiapkan peserta didik yang siap untuk menjalankan kehidupan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memainkan peran yang penting dalam pembentukan sikap, karakter, serta perilaku peserta didik sesuai nilai-nilai Pancasila, dan dapat menjadi mereka warga negara yang baik.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila

Secara umum, tujuan dari Pendidikan Pancasila ialah untuk mengembangkan karakter siswa menjadi pribadi yang taat, berakhlak mulia, kreatif, serta memiliki kecerdasan dan dapat hidup bertanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Wahab & Sapriya (2011) ialah untuk mengembangkan warga negara yang cerdas sekaligus berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan menurut *National Council for the Social Studies* (NCSS) (dalam Winarno, 2025, hlm. 11) menyebutkan bahwa tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Membekali warga negara dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang akan dihadapi di kehidupan dewasa.
- b. Menumbuhkan kesadaran warga negara terhadap dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peradaban manusia serta kemampuan untuk memanfaatkannya guna meningkatkan nilai kehidupan.
- c. mempersiapkan warga negara agar memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam berbagai aktivitas ekonomi.
- d. Mengembangkan kemampuan warga negara dalam mengumpulkan dan mempertimbangkan berbagai nilai-nilai sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan yang efektif di tengah dinamika perubahan global.
- e. Menumbuhkan kesadaran warga negara dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang, sehingga diperlukan keterbukaan dalam menerima fakta-fakta baru, ide-ide baru, serta pola kehidupan yang berbeda.

- f. Mendorong keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan dengan menyampaikan pendapat kepada wakil rakyat, ahli, maupun tenaga profesional.
- g. Menanamkan keyakinan mengenai pentingnya kebebasan individu serta kesetaraan hak untuk seluruh warga negara sebagai prinsip yang dijamin dalam Undang – Undang.
- h. Menumbuhkan rasa bangga terhadap pencapaian bangsa, sikap apresiatif terhadap kontribusi yang diberikan oleh bangsa lain, serta mendukung upaya perdamaian dan kerja sama antarnegara.
- i. Mengembangkan kemampuan warga negara dalam memanfaatkan seni kreatif guna memperkaya pemaknaan terhadap pengalaman kemanusiaan yang bersifat universal maupun keunikan individu.
- j. Membekali warga negara dengan kemampuan memilih opsi terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Fungsi Pendidikan Pancasila dalam Pembentukan Karakter

Pendidikan Pancasila berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik dan bangsa Indonesia. Sebagai landasan negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki nilai-nilai tinggi yang menjadi pedoman hidup bangsa dalam pembentukan perilaku moral dan tingkah laku warga negara. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila bukan hanya digunakan sebagai media dalam menyampaikan pengetahuan idiologis, namun juga untuk membentuk prinsip-prinsip moral karakter dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut Nanda (2025), Pendidikan Pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika dalam mengembangkan karakter peserta didik dengan cara mengajarkan nilai kemanusiaan, agama, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Pendidikan Pancasila diarahkan untuk membantu peserta didik mengembangkan karakter positif agar mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik di kelas maupun di tengah masyarakat. Pendidikan Pancasila juga merupakan fondasi utama dalam mengembangkan karakter bangsa yang memiliki integritas,

khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi (Maulida & Oktavia, 2025). Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila secara terpadu dalam kurikulum, keteladanan guru, serta pembiasaan perilaku positif, Pendidikan Pancasila mampu menumbuhkan karakter kejujuran, toleransi, tanggung jawab, keadilan, dan peduli terhadap sesama.

Sumiati *et al.*, (2025) menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam membentuk karakter moral peserta didik. Pendidikan ini membantu peserta didik dalam memahami serta menginternalisasikan prinsip-prinsip nasionalisme, hak dan kewajiban kewarganegaraan, serta sikap toleran terhadap keberagaman. Maka dari itu, Pendidikan Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan generasi bangsa yang berkarakter, bermoral, serta mampu menghadapi berbagai isu global tanpa mengorbankan cita-cita kebangsaan.

4. Pendidikan Pancasila Sebagai Media Penguatan Karakter Toleransi

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, Pendidikan Pancasila berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai dasar negara sebagai pedoman hidup dalam berkehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Pancasila bukan hanya mencakup pemahaman pengetahuan saja, namun juga berfokus pada pengembangan sikap dan karakter pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai potensi peserta didik agar mereka dapat menjadi pribadi yang taat, bertakwa, dan bermartabat, serta mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai media untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus membentuk karakter yang toleran.

Pada dasarnya, materi Pendidikan Pancasila mencakup pemahaman terkait prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan negara dan pandangan hidup bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, hak dan kewajiban, sistem demokrasi, Hak Asasi Manusia, serta wawasan mengenai

kebangsaan dan keberagaman budaya. Materi – materi tersebut saling berkaitan dan terarah untuk menumbuhkan kesadaran bahwa adanya keberagaman yang merupakan kenyataan sosial yang harus dihargai. Menurut Tinambunan *et al.*, (2025), Pendidikan Pancasila bukan hanya menjelaskan mengenai pengetahuan saja, tetapi juga membantu dalam mengasah kemampuan sosial serta menumbuhkan karakter demokratis yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Maka dari itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila bukan hanya berhenti pada aspek pemahaman konseptual, melainkan berlanjut pada pembentukan sikap saling menghargai.

Sejalan dengan hal tersebut, proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dalam hal ini, peserta didik bukan hanya menguasai konsep dari nilai-nilai Pancasila saja, melainkan juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari – hari. Menurut Alfitriyani *et al.*, (2025) menyebutkan bahwa implementasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat membentuk karakter toleransi peserta didik melalui berbagai kegiatan seperti diskusi kelas, analisis studi kasus, dan internalisasi nilai keberagaman dalam kegiatan kelas lainnya. Selain itu, guru juga berperan sebagai teladan dengan menunjukkan sikap menghargai perbedaan antar sesama. Maka dari itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila pada dasarnya adalah proses pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di lingkungan sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan karakter toleransi memiliki landasan yang relevan dengan nilai -nilai Pancasila, di mana setiap sila dalam Pancasila pada hakikatnya memuat prinsip saling menghormati dan menghargai terhadap keberagaman dan kemanusiaan. Secara menyeluruh, Pancasila mengajarkan untuk pentingnya saling menghargai perbedaan keyakinan, pandangan, latar belakang sosial, maupun budaya, serta mendorong penyelesaian setiap perbedaan melalui cara yang bijaksana dan bermartabat. Nilai-nilai ini tidak

terpisah, melainkan saling terhubung dalam membentuk sikap saling menghormati, menghargai, serta menjaga persatuan dalam kehidupan bersama.

Dengan begitu, tujuan akhir dari pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai sarana penguatan karakter toleransi ialah terbentuknya peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Pendidikan Pancasila peran penting sebagai media efektif dalam memperkuat karakter toleransi, karena mampu mengintegrasikan nilai, pengetahuan, serta praktik dalam satu kesatuan selama proses belajar mengajar. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila, diharapkan peserta didik mampu tumbuh menjadi warga negara yang sadar akan keberagaman, empati, dan berkomitmen untuk mempertahankan persatuan dan keharmonisan bangsa meskipun banyak perbedaan. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila memainkan peran yang penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman bangsa.

E. Kajian Mengenai Tindakan *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Bullying merupakan tindakan menyakiti seseorang secara disengaja yang dilakukan berulang-ulang oleh individu maupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mempermalukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *bullying* atau perundungan ialah aktivitas mengganggu, mengusik, atau menyusahkan secara terus-menerus. Secara akademis, *bullying* juga diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih rentan, baik dari bentuk fisik maupun kata-kata. Tujuannya untuk menimbulkan rasa takut, tidak berdaya dan kehilangan harga diri pada korban (Kasanah *et al.*, 2023).

Menurut Olweus (dalam Budiman & Asriyadi, 2021, hlm 10), *bullying* merupakan perilaku buruk yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman serta dilakukan berulang-ulang. Dengan demikian, *bullying* dapat dimaknai sebagai tindakan kekerasan fisik

maupun verbal yang dilakukan secara terus-menerus, serta mencerminkan adanya perbedaan kuat antara pelaku dan korban.

2. Jenis – Jenis *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Jenis-jenis dari tindakan *bullying* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Menurut Wiyani (2021) (dalam Budiman & Asriyadi, 2021), terdapat beberapa jenis tindakan *bullying*, sebagai berikut:

a. *Bullying* Fisik

Bullying fisik ini merupakan tindakan langsung yang mudah diamati, yang menimbulkan cedera atau rasa sakit pada korban. Contohnya memukul, menendang,, melemparkan barang, meludahi, atau bahkan menghukum korban dengan menyuruhnya berlarian di lapangan.

b. *Bullying* Verbal

Bullying verbal ini terdeteksi melalui pendengaran dan menggunakan kata – kata yang menyakitkan atau merendahkan korban. Contohnya seperti memaki, mengucilkan, menghina, menyebarkan fitnah, memanggil dengan julukan kasar.

c. *Bullying* Digital (*Cyberbullying*)

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, muncul bentuk baru yaitu *cyberbullying*, yakni Tindakan *bullying* yang dilakukan di media sosial, pesan singkat atau platform digital. Contohnya seperti ujaran kebencian di kolom komentar, menyebarkan foto atau video memalukan tanpa izin, atau mengirim pesan mengancam. Karena bersifat publik, dampak dari *cyberbullying* ini dapat meluas dan sulit untuk dihapus.

Dengan melihat komponen di atas, dapat dikatakan bahwa *bullying* dapat berdampak serius terhadap perkembangan emosional remaja, baik dalam hal fisik, pikiran, maupun interaksi sosial.

3. Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Bullying bukanlah perilaku yang hadir secara tiba-tiba, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Faktor Keluarga

Tindakan *bullying* sering terjadi karena kondisi keluarga yang tidak harmonis atau bermasalah. Misalnya anak yang tidak dapat kasih sayang orang tuanya, orang tua yang selalu memberikan hukuman atau kondisi rumah yang terlalu penuh tekanan. Karena itu anak sering meniru perilaku kekerasan yang mereka lihat dalam konflik keluarga, yang kemudian dia terapkan pada teman sebayanya. Jika lingkungan sekitar tidak memberikan dampak yang jelas atas tindakan agresif ini, anak akan berpikir bahwa perilaku menekan orang lain dapat meningkatkan kekuasaan mereka. Akibatnya, anak akan berpotensi mengembangkan tindakan *bullying*.

b. Faktor Sekolah

Lingkungan sekolah juga dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindakan *bullying*. Secara umum, pihak sekolah sering kali kurang memperhatikan adanya tindakan *bullying*, sehingga para pelaku mendapatkan penguatan terhadap perilaku agresifnya. Sekolah yang memberikan hukuman negatif tanpa membangun rasa saling menghargai, justru dapat memperkuat perilaku intimidasi antar peserta didik.

c. Faktor Teman Sebaya

Interaksi dengan teman sebaya juga dapat memengaruhi tindakan *bullying*. Beberapa remaja melakukan *bullying* supaya mereka dapat diterima di dalam kelompok tertentu, meskipun sebenarnya mereka merasa tertekan dan tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Tekanan dari teman sebaya dapat mendorong anak untuk meniru atau terlibat dalam tindakan *bullying*.

d. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor dari lingkungan sosial juga dapat menyebabkan seseorang melakukan *bullying*. Salah satunya kemiskinan, yang membuat beberapa anak melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat menimbulkan perilaku seperti

pemalakan atau tindakan intimidatif antar peserta didik di sekolah.

e. Media Massa

Media massa, seperti televisi dapat memengaruhi pola perilaku *bullying* pada anak-anak. Mereka akan meniru adegan-adegan atau kata-kata yang mereka lihat dari tayangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa media juga berperan penting dalam membentuk perilaku agresif pada remaja.

Keluarga, lingkungan sosial, teman sebaya, dan tayangan televisi merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap munculnya tindakan *bullying*. Oleh sebab itu, peserta didik perlu diberikan kemampuan untuk menyaring serta membedakan mana pengaruh positif dan negatif agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

F. Kajian Mengenai Pendidikan di Era *Society 5.0*

1. Pengertian Era *Society 5.0*

Society 5.0 dapat dipahami sebagai konsep masyarakat yang menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap perkembangan teknologi. Artinya, semua kemajuan digital seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Internet of Things (IoT)*, *big data*, serta robotika bukan hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas industry, tetapi juga menjawab persoalan kehidupan manusia sehari – hari. Melalui konsep ini, teknologi diharapkan mampu membantu dalam mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan Kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan (Ardini *et al.*, 2021, hlm. 22-24).

Menurut Iffad *et al.*, (2023), *Society 5.0* bukan hanya berfokus pada aspek teknologi dan ekonomi saja, namun juga mencakup pada dimensi psikologis manusia. Di era *society 5.0*, kesejahteraan psikologis menjadi hal penting untuk membangun kota cerdas ramah

manusia. Rasa aman, nyaman, serta stabilitas mental masyarakat menjadi indikator dari keberhasilan dalam penerapan *society 5.0*, karena teknologi yang maju tidak akan berarti tanpa adanya keseimbangan emosional dan sosial penggunaannya.

Selain itu, konsep *society 5.0* juga menyoroti pentingnya pendidikan serta pelatihan untuk membentuk masyarakat yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pendidikan di era ini bukan hanya ditujukan untuk melahirkan individu yang terampil secara teknis, namun juga berkarakter, beretika, serta memiliki kesadaran moral terhadap dampak sosial dari teknologi (Possumah *et al.*, 2024). Hal ini sejalan dengan gagasan *education 5.0*, yaitu pendidikan yang menggabungkan kecerdasan digital dengan nilai – nilai kemanusiaan agar peserta didik mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif di tengah perubahan.

Maka dari itu, *society 5.0* bukan hanya mengenai revolusi teknologi, namun juga mengenai revolusi nilai dan moral. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat dari kemajuan digital bukan hanya sekedar pengguna, tetapi sebagai pengarah utama dari bagaimana teknologi seharusnya digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam kerangka ini, aspek psikologis, etika digital, dan tanggung jawab sosial menjadi elemen utama yang membedakan *Society 5.0* dengan revolusi sebelumnya.

2. Karakteristik Era *Society 5.0* dalam Dunia Pendidikan

Era *Society 5.0* adalah konsep masyarakat dengan mengutamakan kebutuhan manusia dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Di dunia Pendidikan, di era ini ditandai dengan adanya penggabungan antara teknologi dengan proses pembelajaran sehingga kegiatan belajar lebih fleksibel, inovatif, serta mengutamakan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran juga bukan hanya berorientasi pada pemahaman materi, namun juga menitikberatkan pada perkembangan kemampuan abad ke-21 mencakup kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam era *society 5.0* menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang berlangsung cepat (Possumah *et al.*, 2024).

Selain itu, karakteristik pendidikan di era *Society 5.0* ditandai dengan adanya gabungan antara ruang fisik dan ruang digital yang menghasilkan pembelajaran berbasis data serta pemanfaatan dalam teknologi sebagai media dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Teknologi dalam pendidikan bukan hanya digunakan sebagai sarana dalam menyimpan informasi, melainkan juga sebagai sarana untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Wibowo, 2023).

Dalam perspektif pedagogis, era *Society 5.0* menekankan bahwa pentingnya pembelajaran yang mengembangkan kecakapan hidup di abad ke – 21 atau 4C, yaitu *creativity, critical thinking, communication, dan collaboration*. Pembelajaran di era ini menuntut pendidik untuk mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi sekaligus tetap berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik menyeluruh (Ardini *et al.*, 2021).

Dengan demikian, karakteristik era *society 5.0* di dunia pendidikan tidak semata-mata berfokus pada penggunaan teknologi digital saja, namun juga memposisikan manusia sebagai pusat utama pada proses pembelajaran. Kolaborasi antara teknologi dan pedagogi diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan bermakna, sekaligus dapat mengembangkan kecakapan abad ke – 21 peserta didik. Dengan begitu, pendidikan di era *society 5.0* menuntut adanya kesiapan pendidik maupun peserta didik untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial secara berkelanjutan, agar tujuan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dapat tercapai secara optimal.

3. Tantangan dan Peluang Guru dalam Pembentukan Karakter di Era *Society 5.0*

Di era *Society 5.0* banyak sekali tantangan bagi guru, terutama dalam penyesuaian metode mengajar dengan perkembangan teknologi digital yang terus berkembang. Guru dituntut harus mampu menguasai kemampuan di bidang digital serta mampu memanfaatkan teknologi dalam proses mengajar agar lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sementara itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan dalam membentuk karakter peserta didik, seperti kemampuan untuk menyaring informasi, mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, serta mengantisipasi dampak negatif dari media digital terhadap perilaku sosial peserta didik (Possumah *et al.*, 2024). Oleh sebab itu, guru perlu memadukan pembelajaran karakter dalam penggunaan teknologi agar peserta didik bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga unggul dalam bersikap baik di media digital.

Di sisi lain, era *Society 5.0* juga memiliki kesempatan besar bagi guru untuk menciptakan inovasi pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Menurut Wibowo (2023), teknologi membantu guru menemukan berbagai sumber belajar, memanfaatkan media digital dalam proses mengajar, serta mampu menciptakan pembelajaran yang hanya memfokuskan pada kebutuhan peserta didik. Pemanfaatan teknologi memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas dan memperluas jaringan kolaborasi dalam dunia pendidikan.

Selain itu, pembelajaran di era ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan *pedagogical leadership*. Ardini *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa kemampuan tersebut merupakan kemampuan dalam memimpin proses pembelajaran dengan menciptakan suasana belajar yang inovatif serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Guru bukan hanya sekedar memberikan informasi, melainkan juga sebagai pendamping yang menciptakan

suasana belajar yang memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, serta mandiri. Peran guru juga penting dalam mendorong perkembangan karakter di era *society 5.0*, karena di era ini mengutamakan pentingnya antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, di era *Society 5.0* ini menuntut guru untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Guru harus memanfaatkan teknologi secara bijak dalam pembelajaran supaya peserta didik mampu berkembang baik secara akademik, maupun secara sikap dan perilaku di media digital. Dengan demikian, guru berperan penting dalam menyikapi peserta didik yang berkarakter serta mampu menghadapi perkembangan zaman.

G. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan konteks tindakan *bullying* telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di lingkungan perguruan tinggi dan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian :

1. Saminan; Razali; Silahuddin (2025) “Bridging Technology and Tradition: Strategies for Integrating Education and Character Development in Aceh’s Schools in the Era of *Society 5.0*” penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan teknologi dalam proses pembelajaran dapat digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai karakter dan budaya lokal di sekolah. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses belajar yang bukan hanya membekali peserta didik keterampilan digital, namun juga membantu memahami nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, etika digital, serta kepedulian sosial kepada peserta didik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang dipadukan dengan teknologi dan dukungan orang tua serta masyarakat dapat menciptakan suasana belajar yang baik, sehingga perilaku negatif seperti perundungan dapat diminimalkan.

2. Cindy Nurhasanah; Josua Armando tamba; Mery Fernandes Sinaga; Yohana Sinurat; Sri Yunita (2025) “Strategi Guru PPKn dalam Mencegah *Bullying* di Lingkungan Sekolah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa guru PPKn memainkan peranan strategis dalam menciptakan suasana belajar yang damai serta beretika. Guru PPKn juga dianggap mampu menjadi panutan bagi peserta didik, dengan menumbuhkan kesadaran moral serta sosial melalui pembelajaran yang menekankan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya pencegahan *bullying* dilakukan melalui pembiasaan sikap saling menghormati, penyuluhan mengenai bahaya *bullying*, kegiatan diskusi kelas, serta penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari – hari.
3. Mochammad Fathurizal Pamungkas; Afief Amar Purnomo; Hilda Rizki Aulia; Risky Cahayu (2024) “Implementation of Character Education by Teachers As A Solution to Prevent *Bullying*” penelitian ini menjelaskan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu faktor dalam mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan pendidikan. Guru juga bukan hanya sekedar menjadi pendidik, melainkan juga menjadi pembimbing bagi peserta didik dalam mempelajari nilai-nilai moral, empati, serta saling menghormati kepada sesama. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendidikan karakter yang diimplementasikan secara menyeluruh dengan peran guru serta kebijakan sekolah dapat memperkuat moral peserta didik serta mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis sehingga tindakan *bullying* dapat dicegah.
4. Silawatia; Dian Hidayati (2024) “Peran Guru dalam Implementasi Pendidikan Karakter untuk Mengatasi Masalah *Bullying* di Madrasah Ibtidaiyah”. Penelitian ini menekankan pentingnya peran guru dalam menerapkan Pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan *bullying* di madrasah. Guru berfungsi sebagai pembimbing, pemberi arahan, dan pengembangan karakter peserta didik agar mampu memahami serta menghindari perilaku perundungan. Penelitian ini

menyoroti bahwa pendidikan karakter merupakan cara utama untuk mengurangi terjadinya *bullying*. Kolaborasi antara guru dan orang tua dianggap penting untuk menciptakan suasana belajar yang aman dan berkarakter.

5. Maemunah; Abdul Sakban; Ziah Kurniati (2023) “Peran Guru PPKn Melalui Pembimbingan Intensif Sebagai Upaya Pencegahan *Bullying* di Sekolah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa guru PPKn memainkan peran penting dalam pencegahan *bullying* melalui bimbingan yang dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah. Guru PPKn diposisikan sebagai pembina yang bukan hanya memberikan materi, namun juga membantu menanamkan nilai – nilai moral, toleransi, dan saling menghormati. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif guru PPKn dapat mengurangi perilaku *bullying* secara verbal maupun nonverbal dengan membangun kesadaran peserta didik terhadap dampak negatif perundungan.
6. Albertus Arozato Laia; Berkat Persada Lase; Syukur Kasieli Hulu (2023) “*The Role of PPKn Teachers in Strengthening Student Character as an Effort to Prevent Bullying at SMP Negeri 5 Ulunoyo*”. Penelitian ini menyoroti peran guru PPKn dalam memperkuat karakter peserta didik sebagai langkah dalam pencegahan terjadinya *bullying* di sekolah. Guru PPKn berperan dalam membangun kedekatan peserta didik agar menciptakan hubungan yang terbuka serta komunikatif, sehingga peserta didik merasa aman untuk berbagi permasalahan yang dialaminya. Karakter yang ditekankan meliputi toleransi, disiplin, jujur dan pembiasaan selalu berperilaku positif. Namun demikian, ditemukan pula hambatan berupa rendahnya kepercayaan diri sebagian peserta didik dan kemampuan dalam menerima nilai-nilai karakter, yang memengaruhi efektivitas pencegahan *bullying*.
7. Siska Damayanti; Karim Suryadi; Sri Wahyuni Tanshzil (2024) “*School Climate and Bullying Prevention: A Civic Education Perspective*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa lingkungan sekolah

yang positif sangat penting dalam mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial, empati, tanggung jawab, serta perilaku etis peserta didik melalui penanaman nilai-nilai moral dan karakter. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang aman, inklusif, serta suportif yang didukung oleh peran guru, orang tua, serta seluruh pihak sekolah dapat mengurangi frekuensi *bullying* dan menciptakan hubungan sosial yang sehat antarpeserta didik.

8. Maryani; Rina Inayah; Reza Mauldy Raharja (2024) "Pendidikan Karakter sebagai Strategi dalam Pencegahan Perilaku *Bullying* di SMP". Penelitian ini menekankan bahwa pendidikan karakter merupakan strategi fundamental dalam mencegah tindakan *bullying* di sekolah menengah pertama. Pendidikan karakter dipandang mampu membentuk sikap moral peserta didik ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitar mereka. Guru memegang peran utama dalam menggabungkan nilai-nilai karakter ke dalam aktivitas belajar mengajar dan kehidupan sehari – hari, seperti membantu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman, meningkatkan kepekaan terhadap kondisi peserta didik, dan juga melakukan sosialisasi mengenai bahaya *bullying*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya karakter dan kontrol emosi menjadi faktor utama terjadinya *bullying*.
9. Sri Yunita; Grace Sihombing; Cahaya Marsinta Sri Rezeki; Fitri Ananda Rambe; Ni Nyoman Salwa Khairunnisa (2023) "Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Hak dan Kewajiban Siswa dalam mencegah Kejadian Tawuran dan *Bullying* di Sekolah SMPN 2 Sunggal". Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan kewarganegaraan bertanggung jawab membentuk kesadaran peserta didik terhadap hak serta kewajibannya sebagai warga sekolah. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa perilaku tawuran dan *billying* masih terjadi akibat faktor internal

peserta didik seperti kontrol emosi yang lemah, dan faktor eksternal berupa tekanan dari teman sebaya dan budaya kelompok. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta didik masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasikan melalui perilaku nyata, sehingga diperlukan penguatan nilai kewarganegaraan yang lebih kontekstual dalam kehidupan sosial di sekolah.

10. Sarma Uli Luman Gaol; Hotmaida Simanjutak; Lukman Pardede; Juliper Nainggolan (2024) “Peran Guru PPKn sebagai Fasilitator dalam Pencegahan *Bullying* Siswa kelas VII di UPT SMP Negeri 14 medan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa *bullying* di lingkungan sekolah umumnya berbentuk verbal dan sering dianggap perilaku yang wajar oleh peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa guru PPKn memiliki strategi dalam pencegahan *bullying* melalui keteladanan sikap, komunikasi empati, serta penguatan nilai – nilai karakter. Meski demikian, efektivitas pencegahan masih tergantung pada konsistensi guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam setiap interaksi sehari-hari, sehingga pencegahan *bullying* masih bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

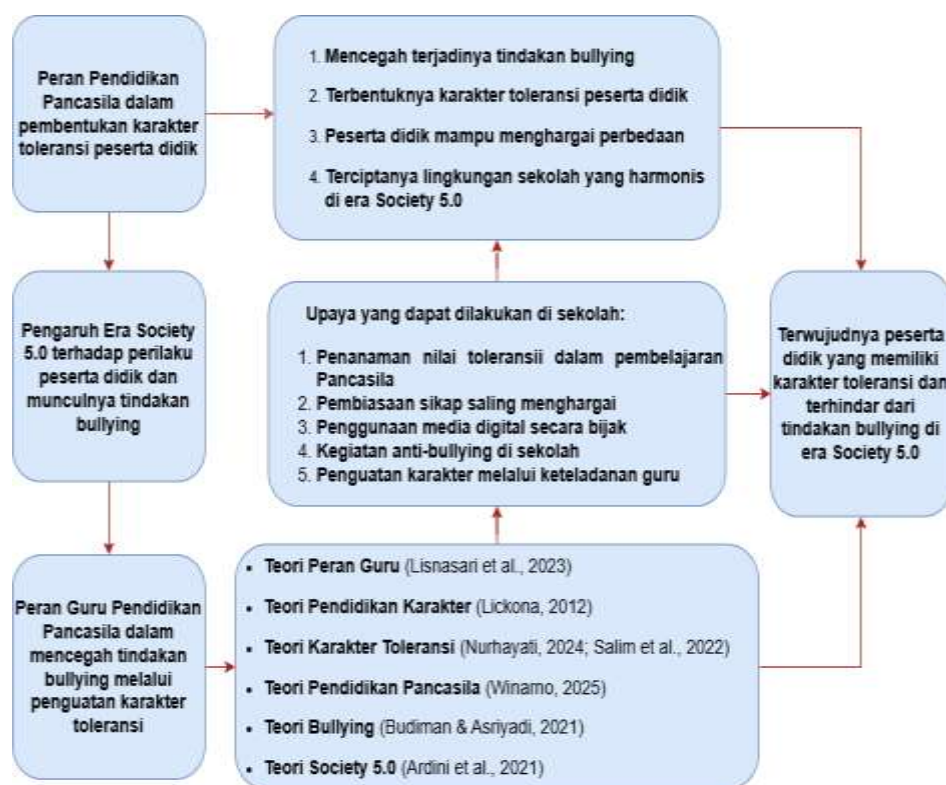
H. Kerangka Berpikir

Konsep kerangka berpikir menggambarkan rangkaian narasi atau proporsi konseptual mengenai struktur kognitif

dan faktor – faktor yang relevan dalam memecahkan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2026). Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir tidak disusun dalam bentuk hubungan kausal yang kaku, melainkan berupa panduan berpikir yang sifatnya fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan hasil temuan di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan lapangan yang melibatkan wawancara langsung bersama narasumber di lingkungan sekolah, observasi terhadap aktivitas pembelajaran, serta analisis terhadap

upaya guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dalam mencegah tindakan *bullying* yang terjadi di kalangan remaja. Sementara itu, peneliti juga menelaah penerapan nilai-nilai Pancasila khususnya nilai toleransi, sebagai upaya penguatan pendidikan karakter di era *society 5.0*. Tujuan penelitian ini ialah untuk memperdalam pemahaman mengenai peran serta strategi guru Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan moral dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, mengembangkan karakter peserta didik yang toleran dan berakhlak mulia, dan menciptakan budaya sekolah yang nyaman, harmonis dan bebas dari tindakan *bullying*. Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2026